

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agustino Leo (Dasar-Dasar Kebijakan Publik) Alfabeta Bandung 2008 .
- Abdul Wahab, Solichin Analisis Kebijakan Publik : dari Formulasi Ke  
Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik. PT. Bumi  
Aksara :Jakarta 2012.
- Arifin.(Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).  
Bandung 2015.
- Abdul Gaffar Karim (ed.), Kompleksitas Persoalan Otonomi di  
Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Relajar. 2003.
- Amrah Muslimin. Aspek-Aspek Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni,  
Bandung, 1986,
- Bagir Manan, (Menyongsong Fajar Otonomi Daerah), *Pusat Studi Hukum  
UII*, Yogyakarta, 2005.
- Bhenyamin Hoessain. Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah:  
Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi. Departemen Ilmu  
Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Indonesia, Jakarta, 2009
- Irwan Sudjito.( Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah), Rieneka Cipta,  
Jakarta, 1990
- Laica Marzuki. (Berjalan-jalan Di Ranah Hukum). Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Marihot Pahala Siahaan, Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia, PT.Raja  
Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ni'matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan  
Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ni'matul Huda,Problematika Pembatalan Peraturan Daerah.UII Press.  
Yogyakarta, 2010.

Sarundajang, (Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

S. Grindle Public Policy :( Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan). Penerbit renada Media : Jakarta 2005.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Soejono Sukanto, Soziologi Suatu Pengantar, Rajawali pers, 2002.

Suharto ( Analisis Kebijakan Publik) Bandung 2012.

The Liang Gie. (Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia), Gunung Agung, Jakarta, 1967.

Thomas. ( Kebijakan Publik ) Jakarta pers 2000.

## **B. UNDANG UNDANG**

Kitab Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah  
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang  
Ketertiban Umum

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Izin Pengelolaan Dan  
Pengusahaan Sarang Burung Walet

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan penertiban  
penangkaran burung walet yang ada di kabupaten Rokan Hilir.

## **C. SUMBER LAIN**

<https://www.goriau.com/berita/baca/timbulkan-suara-cit-cit-wabup-rohil-tegur-pemilik-ruko-pen-angkar-walet.html>, diakses tanggal 17 juli 2020.

<https://www.suarabirokrasi.com/2018/08/08/pemda-rohil-minta-penangkar-burung-walet-ikuti-aturan-ini/>, diakses tanggal 31 juli 2020.

<https://duniawalet.co.id/solusi-cerdas-di-tengah-terpuruknya-harga-sarang-walet/16>, diakses tanggal 31 Juli 2020.

<https://trikmerawat.com/budidaya-walet/>, diakses tanggal 30 juli 2020.